

Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

R Bambang Susetocahyo *

* STAI La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

Article Info	Abstract
Keywords: Administrative board performance, public policy, urban village community empowerment program	<i>The purpose of research is to analyze the involvement of City Village Council in the program: (a) develop program concepts, designs and manuals, (b) try to arrange a program (c) evaluating and monitoring. This policy research paradigm using qualitative. The respondent consisted of 100 participants' village community empowerment program and has done a good cooperation with the government as the drafter of the urban village community empowerment program existence. Results showed that the involvement of the public enthusiasm in every economic, social and physical environment in various forms. An indication of this partnership shows a form of community participation in urban village community empowerment program Gedong in New Cijantung Pekayon Kalisari and East Jakarta.</i>
Corresponding Author: r_bambangsg@gmail.com	Tujuan penelitian adalah menganalisis keterlibatan Dewan Desa Kota dalam program; (a) mengembangkan konsep program, desain dan manual, (b) mencoba memfasilitasi program (c) melakukan evaluasi dan

pemantauan. Penelitian kebijakan ini menggunakan metode paradigma kualitatif. Responden terdiri dari 100 orang peserta program pemberdayaan masyarakat kelurahan dan telah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai eksistensi konseptor dari program pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan antusiasme masyarakat dalam setiap pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik dalam berbagai bentuk. Indikasi adanya kerjasama ini menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan Gedong di Cijantung Baru Kalisari dan Pekayon Jakarta Timur.

©2013 JSAB. All rights reserved

Pendahuluan

DKI Jakarta dengan dukungan infrastruktur yang memadai, maka seluruh Kota di DKI Jakarta program pengentasan kemiskinan relatif baik. Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu mencapai 100%, sedangkan Jakarta Timur yang terendah yaitu 76,92% (Arifin, 2010) dari total kelurahan yang ada di wilayahnya.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas Pemerintah Daerah DKI Jakarta meluncurkan kebijakan daerah berupa Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). PPMK merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ibukota. Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan diketahui bahwa jumlah RW yang tergolong kumuh di DKI Jakarta masih tinggi. Dari 699 RW Kumuh yang disurvei hasilnya adalah 20 RW berkategori kumuh berat, 243 RW berkategori kumuh

sedang, 159 berkategori kumuh ringan, 218 RW berkategori kumuh sangat ringan dan 59 RW berkategori tidak kumuh. Kelurahan Gedong, Cijantung, Baru, Kalisari, dan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kotamadya Jakarta Timur adalah tidak termasuk kelurahan yang kumuh berat.

Menurut Andreson (2000) kebijakan didefinisikan sebagai “...*a relative stable, purposive course of action followed by actor are set of actors in dealing with a problem are matter*”. Sementara itu Dunn (2000) mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan, ia mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Meter dan Van Horn (Widodo, 2008) menyatakan bahwa proses evaluasi adalah “*policy implementation encompasses those action by public or private individuals groups that are directed the achievement of objectives set forth in prior decisions*”. Menurut pendapat ini evaluasi merupakan suatu tindakan baik yang dilakukan individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Jenkins (Parsons, 2006) studi evaluasi adalah studi perubahan; bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan.

Dari beberapa model evaluasi kebijakan, penulis menggunakan model Edward III sebagai salah satu sarana untuk memecahkan evaluasi kebijakan PPMK dan *Congruence Model* sebagai sarana penjelas model Edward III, yang akan menguraikan bagaimana Evaluasi kebijakan PPMK di Kelurahan pada tingkat pelaksana seperti yang dilaksanakan oleh Dewan Kelurahan. Digunakannya kedua model (Edward III dan *Congruence Model*) tersebut di atas, karena dengan konsep-konsep ini dapat digambarkan secara jelas bagaimana peran Dewan Kelurahan dalam evaluasi suatu Kebijakan seperti kebijakan PPMK.

George Edward III menegaskan bahwa dalam menganalisis evaluasi kebijakan publik diperlukan empat variabel, yaitu komunikasi (*Communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut memengaruhi keberhasilan kebijakan tentang PPMK.

Model *Congruence* sebagai alat untuk mengungkap bagaimana evaluasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di DKI Jakarta pada tingkat pelaksana seperti yang dilaksanakan oleh Dewan Kelurahan dalam pengentasan kemiskinan melalui PPMK Di DKI Jakarta. Digunakannya model *Congruence*, karena dengan konsep ini dapat digambarkan secara jelas bagaimana Peran Pemerintah daerah dalam mengevaluasi suatu Kebijakan seperti Kebijakan pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan.

Komunikasi yang efektif terjadi apabila individu mencapai pemahaman bersama, merangsang pihak lain melakukan tindakan, dan mendorong orang untuk berpikir dengan cara baru. Richard et al (2009), mendefinisikan komunikasi sebagai “...the understood as a process beginning with an intention to exchange certain information with others”, sedangkan Shane dan Glinow (2008) mendefinisikan komunikasi “Communication refer to the process by which information is transmitted and understood between two or more people”.

Salah satu faktor yang memengaruhi efektifitas evaluasi kebijakan adalah perilaku implementor. Jika *implementer* setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses evaluasi akan mengalami banyak masalah.

Conger dan Kanungo (Ivancevich, 2008) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses meningkatkan perasaan mampu pada anggota organisasi dengan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidakberdayaan dan menyingkirkan kondisi-kondisi tersebut melalui praktek operasional formal dan teknik informal menyediakan informasi yang berharga.

Pemberdayaan merupakan keterlibatan masyarakat yang benar-benar berarti. Pemberdayaan (*empowerment*), adalah wewenang untuk membuat keputusan dalam suatu area kegiatan operasi tertentu tanpa harus memperoleh pengesahan orang lain (Ivancevich, 2008). Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental. Segala konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah proses perubahan.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah rendahnya persepsi Dewan Kelurahan di kelurahan Gedong, Cijantung, Baru, Kalisari, dan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo terhadap kebijakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan karena; (1) Sosialisasi yang kurang; (2) Materi sosialisasi yang kurang jelas dan belum operasional; (3) Adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda mengenai pengertian, tujuan, dan sasaran kebijakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Metodologi Penelitian

Tujuan evaluasi kebijakan disini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat dari dampak kebijakan terhadap perubahan-perubahan terjadi dalam individu/masyarakat, baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan, baik yang berhasil (*successful*) maupun yang gagal (*unsuccessful*).

Secara umum penelitian analisis kebijakan program tri bina pada PPMK ini bersifat kualitatif dan membutuhkan pemecahan masalah bersifat kualitatif pula. Menurut John W. Creswell (2010), metode pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna (oleh sejumlah individu atau sekelompok orang) dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pengumpulan data diperoleh dari: (1) Observasi; (2) Wawancara (*Interview*); (3) Pengisian daftar pertanyaan (*Kuesioner*).

Teknik pengambilan sampel atau teknik *sampel* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Metode ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. *Sampling* yang *purposive* adalah sampel yang

dipilih dengan cermat, agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif evaluatif yaitu suatu teknik analisis dengan cara menggambarkan data yang telah diolah dan mendiskusikan serta mengevaluasi secara tajam dan detail sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atas data yang diolah tadi. Teknik analisis deskriptif ini identik dengan teknik yang digunakan dalam analisis kebijakan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memengaruhi penguatan lembaga dan kinerja Dewan Kelurahan pada tri bina masyarakat terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Hasil perhitungan frekuensi selengkapny tentang kondisi sosial ekonomi berdasarkan sampel di Kelurahan Gedong, Cijantung, Kalisari, Baru, dan Pekayon dapat dijelaskan sebagai berikut.

Hasil persepsi pada dimensi lingkup program, terlihat kondisi yang sama dengan asas dan prinsip dimana apresiasi responden tinggi yakni penilaian setuju sebanyak 75% dan yang memberikan penilaian tidak setuju sebanyak 25,% dengan demikian secara umum responden memberikan apresiasi positif terhadap lingkup program. Hal ini dapat ditelusuri terhadap nilai pernyataan bahwa program tri bina program PPMK memberikan manfaat atas peningkatan kompetensi Dewan Kelurahan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga usulan atau proposal yang disampaikan oleh masyarakat tidak berlawanan dengan kenyataan yang dilakukan, artinya setelah uang diterima maka penggunaan lebih pada kegiatan produktif, tidak adanya wujud usaha bersama (kemitraan) yang terbangun di lingkungan kelurahan Gedong, Cijantung, Baru, Kalisari, dan Pekayon maupun pada tingkat RW dalam lingkup Kelurahan Gedong, Cijantung, Baru, Kalisari, dan Pekayon dengan demikian secara umum kegiatan bina sosial PPMK dari sudut lingkup program dapat dikatakan berhasil.

Hasil Analisis Biografik selengkapnya tentang kondisi sosial ekonomi berdasarkan sampel di Kelurahan Gedong, Cijantung, Kalisari, Baru, dan Pekayon dapat dijelaskan sebagai berikut. (a) Jenis Kelamin Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi terlihat bahwa jenis kelamin pria sebanyak 70 % dan wanita sebanyak 30%. Dengan demikian, maka ada kecenderungan kelompok pria lebih banyak menikmati program tri bina melalui PPMK dibanding dengan kelompok wanita. Pada hal, saat sekarang wanita sebenarnya tidak hanya bekerja dalam urusan rumah tangga, melainkan juga terlibat dalam kegiatan di luar rumah terutama kegiatan jasa dan perdagangan seperti penjaga toko, pengrajin atau membuka warung makanan; (b) Usia: Pada perhitungan distribusi frekuensi usia responden diperoleh informasi bahwa responden yang berusia 31 sampai 40 tahun mendominasi dalam pelaksanaan program tri bina melalui PPMK. Dari perhitungan ini terlihat pula bahwa masyarakat yang berpartisipasi tergolong dalam usia produktif. Dari usia produktif ini didominasi oleh usia 31 sampai 40 tahun; (c) Pendidikan: Presentasi tingkat pendidikan responden paling tinggi adalah SLTA dan akademi sebanyak masing-masing sebanyak 41%, sementara universitas yaitu 18%. Tingkat pendidikan sangat berhubungan dengan pelaksanaan program PPMK. Salah satu karakteristik partisipan dalam program tri bina PPMK adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha pemberdayaan yang diberikan masyarakat dalam program tri bina. (d) Pekerjaan: Dapat dijelaskan bahwa presentasi jenis pekerjaan responden paling tinggi adalah Jasa dan Lain-lain sebanyak 44%, kemudian disusul oleh dagang sebanyak 16%, sementara presentasi yang paling rendah adalah pengusaha sebanyak 3%.; (e) Penghasilan: Pada perhitungan distribusi frekuensi penghasilan responden diperoleh informasi bahwa responden yang Rp 1.000.000-Rp 5.000.000 per bulan adalah sebanyak 62%. Sedang yang berpenghasilan <Rp 1.000.000 dan Rp >5.000.000 adalah masing-masing 29% dan 9%. Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Dari penelitian kuantitatif ditemukan bahwa kebijakan program pemberdayaan masyarakat hanya memiliki kekuatan 25,9% terhadap persepsi Pemerintah daerah DKI Jakarta, sehingga diperlukan pengaruh lain agar

Pemerintah Daerah DKI Jakarta mempunyai pemahaman yang sama dan motivasi yang kuat agar Kebijakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan ini dioperasionalkan.

Secara kualitatif dari informan dan pengamatan lapangan ditemukan hal sebagai berikut: dari sisi input atau masukkan yang diperlukan untuk memahami persepsi yang sama terhadap kebijakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan ternyata, walaupun pemerintah daerah sudah menyusun rangkaian tindak lanjut kebijakan tersebut. Namun belum berjalan sesuai rencana, karena kebijakan tersebut rawan penyalahgunaan.

Dari temuan lapangan bahwa dengan adanya sosialisasi tentang kebijakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan sudah mulai ada tindak lanjut dengan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah program tri bina, namun upaya ini tidak efektif sama sekali karena unsur Dewan Kelurahan dengan adanya pergantian Gubernur dan pimpinan dinas instansi. Menurut Bapak Henky (45 tahun) dan Ibu Meila (40 tahun) hal ini sangat berdampak pada tertundanya penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tentang program pemberdayaan masyarakat kelurahan dan penetapan Perda Gubernur DKI tentang tim kerja program pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dampak Yang Terjadi dari temuan lapangan, terungkap bahwa kebijakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan belum dilaksanakan dengan baik dan belum memiliki dampak terhadap persepsi, motivasi, dan kepedulian terhadap para pihak yang terkait khususnya unsur kecamatan dan kelurahan, agar mampu dan paham terhadap materi, tujuan, dan arah dari kebijakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan agar terjadi peningkatan dari peran pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatnya fungsi pelayanan publik.

Menurut informan (Bapak Wiros): "...karena kurangnya sosialisasi isu pengentasan kemiskinan dan kelengkapannya, menjadikan isu pengentasan kemiskinan belum terlalu mendapat perhatian, apalagi Dewan Kelurahan sebagai

infrastruktur masyarakat dalam hubungan dengan adanya PPMK merupakan sinkronisasi dan *accountable*, agar menguatkan masyarakat untuk berkarya ...”

Dari temuan ini terungkap bahwa belum terlaksananya kebijakan nasional, belum tersusunnya rencana aksi per kelurahan, belum terbentuknya kelembagaan resmi, dan belum adanya peraturan daerah, program, dan anggaran tentang pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan, sehingga percepatan proses operasionalisasi pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan belum terlaksana, persepsi, motivasi, dan kepedulian Kecamatan Pasar Rebo belum terarah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan. Sehingga jejaring kelembagaan, dukungan masyarakat dan rencana aksi sektoral tidak akan berjalan dengan baik, hal ini berakibat pada visi dan misi, tujuan dan sasaran tidak tercapai yaitu: Kecamatan Pasar Rebo menjadi kecamatan yang terbebas dari masyarakat miskin.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh beberapa simpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Mekanisme tata cara pengguliran dana dan cara pelestarian PPMK, dimana hasil penelusuran terhadap program ini terlihat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1561 Tahun 2002 telah menetapkan pedoman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. PPMK secara fungsional dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan (Dewan Kelurahan, Rukun Warga, Unit Pelayanan Keuangan Masyarakat Kelurahan = UPKMK) dengan pendamping LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).namun belum tersusunnya rencana aksi per kelurahan tentang pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan, sehingga percepatan proses operasionalisasi pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan belum terlaksana, persepsi, motivasi, dan kepedulian Kecamatan Pasar Rebo belum terarah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan.

2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Gedong, Cijantung, Baru, Kalisari, dan Pekayon berjalan sebagaimana, namun Dewan Kelurahan belum optimal melakukan pendampingan usaha (Bina Ekonomi) karena tidak secara tegas ditunjukkan oleh Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Aksi dana bergulir, sehingga dikhawatirkan evaluasi PPMK tidak dapat memenuhi harapan.
3. Ternyata rendahnya kinerja Dewan Kelurahan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut kedalaman pengetahuan, kerjasama, kehadiran dan inisiatif. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Tri bina PPMK di Kelurahan Gedong, Cijantung, Baru, Kalisari, dan Pekayon dihasilkan pengelompokan yang terbagi atas 3 (tiga) faktor berdasar skala prioritas dari yang sangat penting dan perlu segera mendapat perhatian serius utamanya di tingkat pelaksanaan yang kemudian diklasifikasikan lagi berdasar bidang Sosial, Ekonomi dan Fisik.

Implikasi

Rancangan pengoptimalan Program Tri Bina PPMK yang diimplementasikan kepada masyarakat setempat diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan kesejahteraan masyarakat namun terbentuknya pola pikir kemandirian dengan penguatan kelembagaan ekonomi dan kemasyarakatan serta peningkatan sumber daya manusia melalui efektifitas sistem informasi, sosialisasi, pendampingan, evaluasi, dan pengelolaan dampak sosial. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja dewan kelurahan dalam implementasi program tri bina PPMK, pemerintah setempat hendaknya memberikan pelatihan, penyuluhan atau peningkatan kemampuan dewan kelurahan, sehingga dewan kelurahan merasa benar-benar dapat memenuhi tujuan program ini.

2. Untuk perbaikan di bidang kelembagaan diperlukan pengoptimalan sistem informasi pelaksanaan Program Tri Bina PPMK yaitu Sistem yang dilukiskan sebagai serangkaian prosedur dan mekanisme dalam rangka akumulasi, penyimpanan, pengambilan, yang didesain untuk memberikan informasi atau petunjuk pelaksanaan di tingkat kelurahan dan dapat diakses secara langsung. Sistem informasi manajemen keluaran yang diminta telah dicocokkan dengan karakteristik wilayah.
3. Guna Perbaikan di bidang ekonomi diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran dana yang tentunya melaksanakan pedoman pelaksanaan secara menyeluruh dan konsisten tanpa disertai kepentingan individu atau golongan, selain itu diperlukan juga peningkatan sumber daya manusia dengan Program sosialisasi dan bimbingan kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi masyarakat lokal.
4. Perbaikan program bina sosial dilakukan dengan pengelolaan dampak sosial melalui pembentukan sebuah forum di tingkat akar rumput yang efektif menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah/pemrakarsa PPMK, membuat mekanisme perekrutan dimana anggota masyarakat yang menjadi anggota atau petugas PPMK mereka yang telah memiliki integritas yang cukup baik dalam lingkungan, dan melakukan transparansi pada setiap tahapan program.
5. Perlunya peningkatan intensitas sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) oleh pemerintah, agar program ini berada pada tingkat kemitraan (*partnership*), dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Kelima rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan PPMK tersebut harus disertai dengan penyesuaian pelaksanaan di lapangan dengan menyusun profil sosial dan melakukan pemetaan sosial, sehingga selaras antara apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan Program Bina Ekonomi PPMK yang merupakan alat terwujudnya cita-cita tersebut.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003*. <http://samudra-studio.com>
- Andreson, James. (2000). *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2000). *Public Policy Analysis; An introduction*. New Jersey: Person Education.
- Edward, George C. III dan Sharkansky, Ira. (1978). *The Policy Predicament*. San Fransisco: W.H. Freeman.
- Ivancevich, John M., Robert Konopaske and Michael T. Matteson. (2008). *Organization Behavior and Management*. Singapore: McGraw-Hill International, Inc.
- Ivancevich, John M. (2008). *Human Resources Management*. Singapore: McGraw-Hill International, Inc.
- Jeddawi, Murtir. (2008). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Total Media.
- Parsons, Wayne. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana, Jakarta
- Peraturan Daerah Nomor 1561 Tahun 2002.
- Richard, et al. (2009). *Measuring Organizational Performance: Towards Methodological Best Practice*. Journal of Management.
- Shane, Mc & Von Glinow. (2008). *Organizational Behavior*. New Delhi: McGraw Hill Publications.
- Robbins, Stephen P. and Timothy A. Judge. (2009). *Organizational Behavior*. Singapore: Pearson International.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance, Telaah Dari Dimensi, Akuntabilitas Dan Control Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia
- http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01sep06.pdf
- http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01sep06.pdf